



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW 5216, (021) 3846322; FAKSIMILE (021) 34434814  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-2066/JPB.1/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penawaran Program Beasiswa Pascasarjana  
New Zealand ASEAN Scholarships (NZAS) Tahun 2019

27 Februari 2018

Yth. 1. Para Direktur  
2. Para Kepala Kantor Wilayah  
3. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat DJPb  
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kementerian Keuangan nomor S-227/PP.2/2018 tanggal 21 Februari 2018 hal Penawaran Beasiswa Pascasarjana *New Zealand ASEAN Scholarships* (NZAS) 2019, dengan ini disampaikan bahwa Kepala Pusdiklat PSDM menginformasikan penawaran program Beasiswa Pascasarjana *New Zealand ASEAN Scholarships* (NZAS) tahun 2019 dari Kedutaan Besar Selandia Baru. Program yang ditawarkan berupa program magister (S2) dan doktoral (S3) di Selandia Baru dengan program studi pada bidang Manajemen Sektor Publik.

Terkait penawaran tersebut, dimohon bantuannya agar menginformasikan kepada seluruh pegawai DJPb pada lingkup unit kerja masing-masing. Dalam pengusulan calon peserta, diharapkan dapat memperhatikan komposisi SDM pada unit masing-masing baik dari sisi kualitas maupun kuantitas demi menjaga harmonisasi dan keselarasan antara pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari.

Usulan calon peserta dan berkas kelengkapan diterima Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 12 Maret 2018. Bersama ini dilampirkan ketentuan dan persyaratan untuk mengikuti seleksi beasiswa. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian SDM Sekretariat DJPb (Narahubung: Dhani, telepon 021-3846322).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



A. Haryana

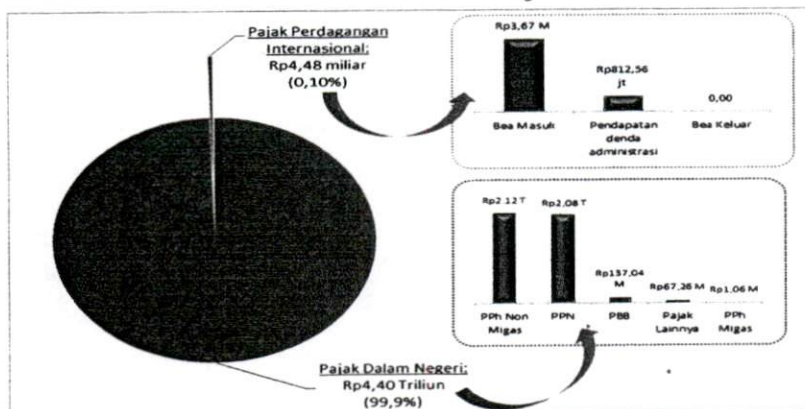
NIP 19600603 198502 1 001

## Capaian Kebijakan Ekonomi Makro

Uraian	Target Provinsi Aceh 2017 sesuai KUA	Capaian Aceh Tahun 2017	Capaian Nasional 2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,2 - 6 persen	4,19 persen	5,07 persen
Tingkat Kemiskinan	15,5 - 16 persen	15,92 persen	10,12 persen
Tingkat Pengangguran	7,5 - 8,6 persen	6,57 persen	5,50 persen
Tingkat Inflasi (inflasi tahunan)	4,0 - 5,0 persen	4,25 persen	3,61 persen
IPM	Diatas rata-rata nasional	7,0 (dibawah nasional)	70,18

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari lima indikator ekonomi makro yang ditetapkan targetnya pada KUA Provinsi Aceh, tiga diantaranya masih sesuai target yaitu antara lain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi.

## Realisasi Penerimaan Pajak 2017



Dari total realisasi penerimaan pajak di Aceh tahun 2017, sebesar Rp4,4 triliun merupakan Pajak Dalam Negeri dengan kontribusi sebesar 99,9 persen. Sedangkan Pajak Perdagangan Internasional hanya memberikan kontribusi sebesar Rp4,48 miliar atau 0,10 persen dari total penerimaan pajak di Aceh tahun 2017.

#### LAMPIRAN I

Surat Sekretaris DJPb

Nomor : S-206/PB.1/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

#### A. Ketentuan Umum

- a. Calon peserta melengkapi seluruh berkas pendaftaran (*hardcopy*) dan menyampaikannya kepada Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal **12 Maret 2018**.
- b. Aplikasi pendaftaran yang dikirimkan oleh calon peserta secara mandiri kepada Pusdiklat PSDM Kementerian Keuangan tanpa melalui Bagian Sumber Daya Manusia Setditjen Perbendaharaan, tidak akan diproses lebih lanjut.
- c. Panitia tidak menerima berkas aplikasi dan berkas pendukung yang disampaikan melalui faksimile, surat elektronik, hasil faksimili yang difotokopi, ataupun file surat elektronik yang dicetak. Oleh karena itu, diharapkan para pelamar dapat menyediakan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan sesuai dengan kriteria yang diminta.
- d. Pilihan bidang studi harus sesuai dengan Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM) DJPb, yaitu pada bidang Manajemen Sektor Publik.

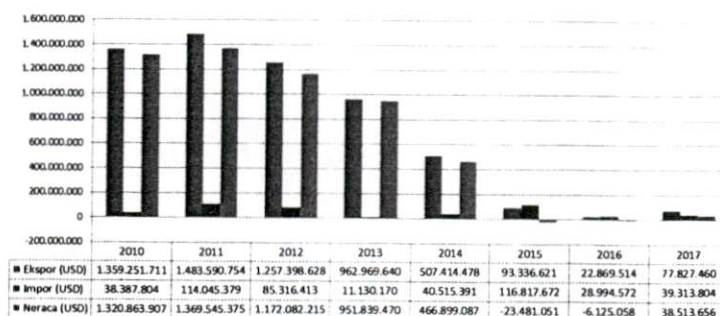
#### B. Persyaratan

##### 1. Persyaratan Umum dari Kementerian Keuangan

- a. Berstatus PNS pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan masa kerja minimal dua tahun.
- b. Usia tidak lebih dari 40 tahun untuk pendaftar program magister (S2) dan 42 tahun untuk pendaftar program doktoral (S3) pada tanggal 14 Maret 2018.
- c. Pangkat dan golongan minimum adalah Penata Muda (III/a) untuk pendaftar magister S2 dan Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk pendaftar program doktoral (S3).
- d. Memiliki ijazah S1/DIV (untuk pendaftar program magister) dan ijazah S2 (untuk pendaftar program doktoral) yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- e. Pendaftar yang gelar sebelumnya diperoleh dari Tugas Belajar, pada tanggal 14 Maret 2018 harus telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti program Tugas Belajar tersebut (dihitung sejak tanggal kelulusan/yudisium sebagaimana yang tercantum dalam ijazah).
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, ataupun tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku (dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Kantor unit masing-masing).
- g. Tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada program lain, tidak memiliki ijazah S2 (magister), ataupun tidak sedang mengikuti pendidikan magister/doktoral yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- h. Direkomendasikan oleh atasan langsung, bahwa calon peserta berpotensi untuk dikembangkan sebagai karyasiswa program pascasarjana (minimal Pejabat Eselon III).
- i. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah yang diperoleh setelah tanggal 14 September 2017.
- j. Memiliki DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- k. Tidak sedang dalam proses kepindahan ke unit organisasi lain.
- l. Membuat surat pernyataan kesanggupan kembali bekerja pada Ditjen Perbendaharaan dan bersedia melaksanakan ikatan dinas dan jika tidak memenuhinya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian.
- m. Bersedia memenuhi kewajiban untuk menyerahkan ijazah dan transkrip asli tugas belajar pada Ditjen Perbendaharaan sampai dengan berakhirnya masa ikatan dinas.



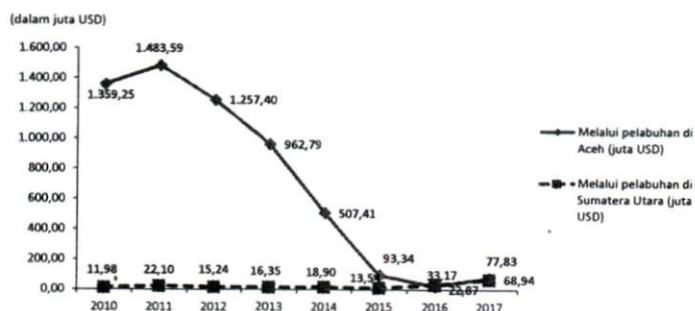
## Ekspor-Impor Aceh



Ekspor Aceh mengalami kenaikan signifikan, dan neraca perdagangan kembali surplus.

Jika diuraikan per komoditi ekspor, kenaikan nilai ekspor yang terjadi di Aceh pada tahun 2017 (dibandingkan tahun sebelumnya) seluruhnya berasal dari komoditi non migas, dengan kontribusi terbesar yaitu berasal dari ekspor bahan bakar mineral batu bara. Nilai ekspor bahan bakar mineral di Aceh pada tahun 2017 sebesar 66,91 juta USD, naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,42 juta USD yang merupakan dampak dari kenaikan produksi tambang batu bara di Kabupaten Aceh Barat.

## Ekspor-Impor



Pasca periode habisnya produksi migas di Aceh, nilai ekspor yang dilakukan di pelabuhan Aceh menurun drastis, yang mana tren penurunan tersebut terjadi sejak tahun 2015. Di sisi lain, ekspor komoditi non migas masih banyak yang di ekspor melalui pelabuhan di luar Aceh (khususnya di Provinsi Sumatera Utara).

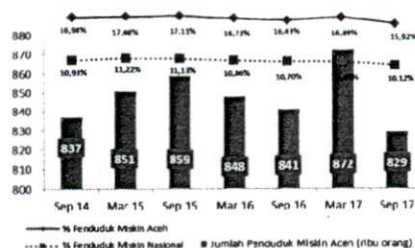
## 2. Persyaratan Khusus dari Pengelola Beasiswa

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Melakukan registrasi/pendaftaran secara daring (*online*) pada laman [mfat.govt.nz/scholarships](http://mfat.govt.nz/scholarships) serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam laman tersebut. Pendaftaran secara daring dibuka sampai dengan tanggal 14 Maret 2018.
- c. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dibuktikan dengan skor bahasa Inggris sebagai berikut:
  - i. Skor IELTS minimal 6.5 dengan nilai minimal masing-masing bagian tidak kurang dari 6.0, atau
  - ii. Skor total TOEFL iBT minimal 90.
  - iii. Untuk diperhatikan bahwa setiap program studi kemungkinan memiliki persyaratan kemampuan berbahasa Inggris tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga pendaftar sebaiknya memastikan persyaratan tersebut.
- d. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pengelola beasiswa (tercantum dalam laman [mfat.govt.nz/scholarships](http://mfat.govt.nz/scholarships)) tidak perlu disampaikan kepada Pusdiklat PSDM mengingat pendaftaran yang dapat dilakukan secara daring. Pusdiklat PSDM akan memberikan rekomendasi apabila pendaftar memenuhi persyaratan pada Kementerian Keuangan.

## C. Tata Cara Pendaftaran

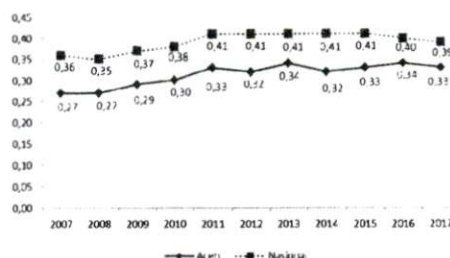
1. Usulan calon peserta seleksi beasiswa dan lampirannya diajukan secara kolektif melalui unit eselon II masing-masing kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Usulan yang tidak melalui unit eselon II tidak akan diproses lebih lanjut.
2. Untuk calon peserta dari unit eselon III lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, harus diajukan secara kolektif melalui unit eselon III. Nota Dinas usulan ditetapkan oleh Kepala Bagian dan dikirimkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
3. Perekaman data calon peserta secara *online* dilaksanakan sebelum mengirimkan berkas pendaftaran (*hardcopy*):
  - a. Perekaman data calon peserta dilakukan secara *online* melalui aplikasi *training* di alamat [training.perbendaharaan.go.id](http://training.perbendaharaan.go.id) mulai tanggal 28 Februari s.d. 12 Maret 2018. Proses perekaman *online* dilakukan oleh:
    - 1) Subbag Kepegawaian pada masing-masing Kanwil, untuk lingkup Kanwil dan KPPN;
    - 2) Subbag Tata Usaha pada masing-masing Direktorat, untuk lingkup Direktorat di Kantor Pusat;
    - 3) Bagian Sumber Daya Manusia untuk lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.
  - b. Para penanggungjawab perekaman *online* tersebut (pengelola kepegawaian) wajib melaksanakan verifikasi secara teliti dan memadai atas seluruh berkas persyaratan calon peserta sebelum diusulkan.
  - c. Manual Pendaftaran terdapat di alamat [training.perbendaharaan.go.id](http://training.perbendaharaan.go.id).
  - d. Dalam proses perekaman *online* melalui aplikasi *training*, dilakukan juga pengunggahan hasil *scan* surat usulan peserta berikut dokumen pendukungnya.
  - e. Proses perekaman tidak menggugurkan kewajiban pengiriman *hardcopy* pendaftaran unit eselon II bersangkutan kepada Bagian Sumber Daya Manusia.
4. Pengiriman berkas pendaftaran (*hard copy*)
  - a. Para calon peserta mendaftarkan diri melalui unit eselon II masing-masing dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

## Kemiskinan



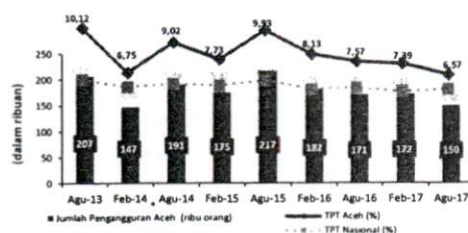
Persentase penduduk miskin Aceh selama periode September 2014 sampai dengan September 2017 terus berfluktuasi. Sempat mengalami kenaikan pada periode Maret 2017 di level 16,89 persen dibanding periode September 2016 yang sebesar 16,43 persen, persentase penduduk miskin Aceh turun di periode September 2017 di level 15,92 persen.

## Gini Ratio



Rasio Gini di Provinsi Aceh pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,33, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,34. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan Rasio Gini Nasional yang sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam angka PDRB per kapita Aceh masih dibawah rata-rata nasional, namun Provinsi Aceh lebih baik dalam hal pemerataan pendapatan.

## Tingkat Pengangguran



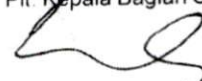
Jumlah pengangguran per Agustus 2017 sebanyak 150 ribu orang, menurun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2016 yang sebanyak 172 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2017 sebesar 6,57 persen, turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2016 yang mencapai 7,39 persen. Tren TPT Aceh terus mengalami penurunan secara berkelanjutan dari sejak periode Agustus 2015. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, angka TPT Aceh masih selalu tinggi jika dibandingkan TPT secara nasional.



- 1) Formulir aplikasi beasiswa yang telah diisi dengan lengkap oleh calon pendaftar (Lampiran III).
  - 2) Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (Lampiran IV).
  - 3) Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa dan tidak memiliki ijazah pascasarjana (S2/S3)/ tidak mengikuti/tidak akan mengikuti program pascasarjana (S2/S3) (Lampiran V).
  - 4) Surat Rekomendasi Atasan Langsung (Lampiran VI).
  - 5) Surat Pernyataan Kesiapan Kembali Bekerja pada Ditjen Perbendaharaan dan menyerahkan ijazah dan transkrip asli (Lampiran VII).
  - 6) Surat Keterangan tidak sedang dalam proses kepindahan ke unit organisasi lain baik di dalam atau di luar lingkungan Kementerian Keuangan (Lampiran VIII).
  - 7) Satu lembar fotokopi Ijazah dan transkrip nilai untuk semua jenjang pendidikan setelah SLTA.
  - 8) Satu lembar fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi.
  - 9) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  - 10) DP3 satu tahun terakhir.
  - 11) Dokumen-dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan oleh pengelola beasiswa dan perguruan tinggi agar diunggah ke laman [mfat.govt.nz/scholarships](http://mfat.govt.nz/scholarships).
- b. Berkas pendaftaran tersebut dikirim secara kolektif melalui unit eselon II masing-masing kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat ke alamat:

Bagian Sumber Daya Manusia  
d/a Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Lantai 2,  
Jl. Lapangan Banteng Timur I No. 2-4, Jakarta Pusat 10710

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Plt. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia,



Tjahjo Purnomo  
NIP 19710209 199203 1 001